WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentag Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4239);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;

33. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013.

34. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013.

35. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal I Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan :
   a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 38.350.390.000,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 38.350.390.000,00,-

   b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 546.231.869.121,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,-
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 546.231.869.121,00,-

   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp. 80.196.254.040,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 400.000.000,00, -

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 80.596.254.040,00,-
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	*Rp.665.178.513.161 ,00,-*

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp. 288.930.688.927,59,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,-
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 288.930.688.927,59,-

2) Belanja Bunga

Semula	Rp. 0,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi

Semula	Rp. 0,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 0,-

4) Belanja Hibah

Semula	Rp. 18.756.700.000,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 18.756.700.000,00,-

5) Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp.	75.618.753.588,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	400.000.000,00,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	76.018.753.588,00,-

6) Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp.	0,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,-

7) Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp.	25.420.563.745,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	25.420.563.745,00,-

8) Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp.	1.000.000.000,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	42.967.722.561,00,-
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	42.967.722.561,00,-

2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	97.711.097.228,00,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	97.711.097.228,00,-	
3) Belanja Modal			
Semula	Rp.	127.516.301.096,00,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	127.516.301.096,00,-	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan			Rp. 678.321.827.145,59,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp. 13.143.313.984,59,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	18.143.313.984,59,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	18.143.313.984,59,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	5.000.000.000,00,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	,00,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00,-	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 13.143.313.984,59,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2013

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

KOTA LHOKSEUMAWE

RINGKASAN PERGESERAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**662,434,773,104.00**	**665,178,513,161.00**	**2,743,740,057.00**	**0.41**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**38,350,390,000.00**	**38,350,390,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.1	Pajak Daerah	15,135,000,000.00	15,421,250,000.00	286,250,000.00	1.89
1.1.2	Retribusi Daerah	9,950,390,000.00	9,664,140,000.00	(286,250,000.00)	2.88)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,865,000,000.00	2,865,000,000.00	0.00	0.00
1.1.4	Zakat dan Infaq/Sadaqah	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00	0.00	0.00
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,700,000,000.00	5,700,000,000.00	0.00	0.00
1.2	**Dana Perimbangan**	**534,159,262,520.00**	**546,231,869,121.00**	**12,072,606,601.00**	**2.26**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65,475,072,520.00	77,547,679,121.00	12,072,606,601.00	18.44
1.2.2	Dana Alokasi Umum	437,793,850,000.00	437,793,850,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	30,890,340,000.00	30,890,340,000.00	0.00	0.00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**89,925,120,584.00**	**80,596,254,040.00**	**(9,328,866,544.00)**	**10.37)**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	10,804,595,477.00	11,075,728,933.00	271,133,456.00	2.51
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	47,024,090,212.00	47,024,090,212.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,000,000,000.00	400,000,000.00	(9,600,000,000.00)	96.00)
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan	22,096,434,895.00	22,096,434,895.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**662,434,773,104.00**	**665,178,513,161.00**	**2,743,740,057.00**	**0.41**
2.	**BELANJA DAERAH**	**665,052,877,079.00**	**678,321,827,145.59**	**13,268,950,066.59**	**2.00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**392,597,992,423.00**	**410,126,706,260.59**	**17,528,713,837.59**	**4.46**
2.1.1	Belanja Pegawai	291,566,156,090.00	288,930,688,927.59	(2,635,467,162.41)	0.90)
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	7,302,400,000.00	18,756,700,000.00	11,454,300,000.00	156.86
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66,308,872,588.00	76,018,753,588.00	9,709,881,000.00	14.64
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	25,420,563,745.00	25,420,563,745.00	0.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	50.00)
2.2	**Belanja Langsung**	**272,454,884,656.00**	**268,195,120,885.00**	**(4,259,763,771.00)**	**1.56)**
2.2.1	Belanja Pegawai	46,389,185,061.00	42,967,722,561.00	(3,421,462,500.00)	7.38)
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	99,107,112,349.00	97,711,097,228.00	(1,396,015,121.00)	1.41)
2.2.3	Belanja Modal	126,958,587,246.00	127,516,301,096.00	557,713,850.00	0.44
	JUMLAH BELANJA	**665,052,877,079.00**	**678,321,827,145.59**	**13,268,950,066.59**	**2.00**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS(DEFISIT)	**(2,618,103,975.00)**	**(13,143,313,984.59)**	**(10,525,210,009.59)**	**402.02**
3.	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**7,618,103,975.00**	**18,143,313,984.59**	**10,525,210,009.59**	**138.16**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,000,000,000.00	15,525,210,009.59	10,525,210,009.59	210.50
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2,018,103,975.00	2,018,103,975.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**7,618,103,975.00**	**18,143,313,984.59**	**10,525,210,009.59**	**138.16**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**2,618,103,975.00**	**13,143,313,984.59**	**10,525,210,009.59**	**402.02**
3.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Lhokseumawe, 9 Desember 2013
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA